Raperda Pertanggung Jawaban APBD 2023 Disahkan Jadi Perda

Senin, 10 Juni 2024

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Pasuruan telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Senin (10/6/2024). Pengesahan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara pengesahan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan dan Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto.

Sebelum disahkan, anggota Pansus (Pansus) menyampaikan sejumlah rekomendasi yang menjadi catatan bagi Pemkab Pasuruan. Salah satu rekomendasi dari Pansus I menyoroti kesesuaian perencanaan dengan realisasi program dan kolaborasi antar organisasi perangkat daerah.

Pansus I juga merekomendasikan agar Kep Mendesa PDDT Nomor 55/2024 tentang pengembangan desa cerdas mendapat perhatian khusus dengan memberikan penguatan anggaran. Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto, menyampaikan terima kasih atas persetujuan DPRD terhadap Raperda tersebut dan menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat.

Realisasi belanja daerah pada 2023 mencapai Rp3,73 triliun atau 93,5 persen dari target. Terdapat efisiensi dan sisa anggaran belanja sebesar Rp258,23 miliar. Angka realisasi ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp8,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi pendapatan daerah pada 2023 mencapai Rp3,658 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Meskipun mengalami kekurangan sebesar Rp61,5 miliar dari target, angka ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp306,55 miliar atau sekitar 9,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.